

## **Deklarasi**

### **“Asosiasaun Nasional Vitima no Familia vitima Martires da Patria (1974 – 1999) “**

Konflik politik dan pendudukan ilegal Indonesia sejak tahun 1974-1999 menghasilkan banyak korban dari masyarakat sipil karena mempertahankan prinsip politik tanpa Kekerasan. Orang-orang sipil ini menjadi korban karena kehilangan sanak keluarga, menderita secara fisik dan psikologis. Sebagian masyarakat sipil menjadi korban karena mempertahankan prinsip politik untuk merdeka, Timor Leste harus menjadi Negara yang merdeka.

Penderitaan panjang yang dialami para korban juga memberi kontribusi untuk diadakannya Referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 dan hasil Referendum telah memerdekakan Timor Leste dari pendudukan ilegal Indonesia, dan restorasi kemerdekaan pada tanggal 20 Mei 2002.

Ketika pemerintahan Timor Leste berdiri pada tahun 2002, telah ada kelompok organisasi korban dan keluarga korban di 13 distrik. Keberadaan kelompok dan organisasi korban dan keluarga korban ini bekerja dan saling mengorganisir untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Sayangnya selama ini kebijakan pemerintahan Timor Leste tidak menunjukkan niat baik dan kuat untuk keadilan, tapi sebaliknya kebijakan pemerintah Timor Leste berusaha untuk menyingkirkan atau melupakan hak korban Pelanggaran HAM masa lalu.

Kenyataan ini berdampak pada korban yang selama ini menderita dan hidup susah setelah kehilangan sanak keluarga, harus berhadapan lagi dengan pelanggaran hak baru dalam aspek sosial dan ekonomi di era kemerdekaan ini. Para korban banyak yang tidak berdaya untuk menghidupi diri dan keluarga, mereka juga mendapat berbagai macam diskriminasi ketika ingin mengakses pelayanan pemerintah.

Melihat pada kenyataan yang ada maka, wakil dari korban dan keluarga korban Nasional Korban pelanggaran HAM 1974-1999 yang pertama, sepakat untuk mendirikan satu organisasi untuk menjadi wadah bagi korban, kelompok dan organisasi keluarga korban yang selama ini masih hidup sendiri-sendiri.

Oleh karena itu, kami 13 orang yang dipilih dalam Kongres ini untuk mewakili para korban dari 13 distrik akan menjalankan organisasi ini untuk periode 2009-2012, atas nama semua korban, dan di depan semua peserta kongress kami menyatakan bahwa hari ini, Jum'at, 4 September 2009, bertempat di Aula pertemuan Joao Paulo II Dili, mendirikan Organisasi dengan nama : Assosiasaun Nasional vitima no familia Vitima Martires da Patria (1974-1999).

Dengan Pengalaman sebagai korban Pelanggaran HAM, maka Assosiasaun Nasional vitima no familia Vitima Martires da Patria (1974-1999) didirikan dengan visi bahwa untuk membangun Timor Leste yang damai dan makmur, maka keadilan perlu ditegakkan di semua aspek dan untuk semua orang. Keadilan masa lalu untuk menjamin

keadilan di masa yang akan datang dan menjamin generasi baru tidak akan menjadi korban.

Dengan demikian Assosiasaun Nasional vitima no familia Vitima Martires da Patria (1974-1999). Didirikan dengan misi :

1. Promosi dan mempertahankan hak untuk keadilan bagi korban Pelanggaran HAM masa lalu
2. Promosi dan mempertahankan Hak untuk Reparasi bagi korban Pelanggaran HAM masa lalu
3. Upaya preventif pengulangan konflik dan Pelanggaran HAM di masa mendatang.

Demikian, deklarasi ini kami buat dengan semestinya.

Wakil korban Martires da patria 13 distrik :

Distrik Los Palos	: Albina Marcal Freitas
Distrik Aileu	: Paulino de Jesus Arajuo
Distrik Liquica	: Elisa dos Santos
Distrik Ainaro	: Clara Pedro Fernandes
Distrik Manufahi	: Flaviano Pereira Lopes
Distrik Suai	: Hermenegildo Ximenes
Distrik Oecuse	: Ciprino da Cunha
Distrik Manatuto	: Eugenia Neves da Costa
Distrik Viqueque	: Moises Correia da Silva Marques
Distrik Bobonaro	: Marciana Gouveia Leite
Distrik Ermera	: Ines Salsinha Trindade
Distrik Baucau	: Augusto Pires